

**GAMBARAN MINAT MASYARAKAT DALAM KEIKUTSERTAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
DI KELURAHAN KEDUNG HALANG BOGOR 2022**

Rahma Yeni ¹, Otonius Hia ²

^{1,2}Universitas Indonesia Maju

¹yenyahya320@gmail.com, ²hyatony@gmail.com

PENDAHULUAN

Keikutsertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi bagian terpenting dalam pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) sebagaimana sistem pelayanan kesehatan Indonesia bertransisi dengan target menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat (UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)). Jaminan kesehatan merupakan jaminan perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang, baik yang telah membayar iuran maupun yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. (Perpres No.82, 2018).

Keikutsertaan masyarakat sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan pelayanan kesehatan terlebih bagi yang kurang mampu, dan mempermudah pemerintah dalam upaya pencapaian target yang telah diharapkan yaitu *Universal Health Coverage*. (BPJS Kesehatan)

Universal Health Coverage (UHC) merupakan suatu rancangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari tahun 2019 untuk mendaftarkan seluruh masyarakat Indonesia dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun rancangan tersebut masih belum sepenuhnya tercapai. Target pencapaian UHC sendiri dari pemerintah yaitu 95% namun pada saat ini kurang lebih 86%

masyarakat Indonesia yang sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk mencapai UHC tersebut maka pemerintah perlu tingkatkan lagi cakupan kepesertaan JKN pada masyarakat Indonesia, pada peserta pekerja penerima upah sudah maksimal cakupan kepesertaan JKN dikarenakan Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Pegawai Swasta dan seluruh PPU wajib didaftarkan oleh pemberi kerja dan mendaftarkan seluruh pegawainya dalam program JKN.

JKN adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah badan atau perusahaan asuransi yang sebelumnya bernama PT. Askes yang menyelenggarakan perlindungan kesehatan bagi pesertanya. BPJS Kesehatan merupakan badan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kepesertaan dalam BPJS kesehatan dibagi atas dua jenis yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan (Non PBI). Peserta PBI meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta jaminan kesehatan sedangkan Peserta Non PBI terdiri dari Pekerja penerima upah (PNS, Anggota Polri dan TNI, Pejabat Negara, Pegawai Swasta), Pekerja bukan penerima upah (pekerja mandiri), dan bukan pekerja (investor, pemberi kerja, penerima pensiun).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, sampai dengan Januari 2022 pencapaian jumlah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 235.719.262 peserta atau 86% dari jumlah penduduk Indonesia. yang terdiri dari peserta PBI yang berjumlah 140.411.958 (59.6%) peserta dan peserta non PBI berjumlah 95.307.304 (40.4%) peserta. Sedangkan peserta non PBI terdiri atas pekerja bukan penerima upah berjumlah 30.914.125 (13.1%) peserta, pekerja penerima upah berjumlah 60.008.295 (25.5%) peserta dan bukan pekerja berjumlah 4.384.883 peserta (1.9%).

Dengan melihat angka capaian nasional ini, maka dapat kita asumsikan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap program JKN sudah cukup baik. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari manfaat yang dijamin oleh program JKN berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif, diantaranya pelayanan promotif, preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif termasuk obat dan

bahan medis. Pemberian manfaat dilakukan melalui teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*).

Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dikatakan berhasil apabila tingkat keikutsertaan masyarakat Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian dari Notoatmojo (2017) menunjukkan bahwa faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan. Adapun faktor eksternal meliputi pengalaman, fasilitas, dan lingkup sosial-budaya. Sedangkan faktor internal meliputi persepsi, pengetahuan, keyakinan, keinginan, motivasi, niat, sikap, dan berbagai alasan lainnya yaitu dengan yakin tidak sering sakit.

Berdasarkan data statistik Dinas Kesehatan Kota Bogor, sebanyak 19.272 jiwa (84%) dari total penduduk sebanyak 22.943 jiwa di Kelurahan Kedung Halang sudah menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sedangkan sebanyak 3.671 jiwa (16%) belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa wilayah Kelurahan Kedung Halang belum memenuhi target nasional sebesar 95% yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran minat masyarakat terkait keikutsertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kelurahan Kedung Halang Bogor dan faktor yang berhubungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2017).

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pemilihan pada pertimbangan kesesuaian dan kecukupan (Heryana, 2018), terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci merupakan

seseorang yang dapat memberikan keseluruhan informasi tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui keseluruhan kondisi/fenomena yang terjadi di masyarakat, juga memahami informasi terkait informan utama. Informan utama dalam penelitian kualitatif merupakan seseorang yang mengetahui secara teknis dan detail terkait permasalahan yang akan dipelajari. Sedangkan informan pendukung adalah seseorang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informasi yang diberikan oleh informan pendukung terkadang tidak didapatkan dari informan kunci dan informan utama.

Informan kunci pada penelitian ini adalah Ketua RT 01/05 Kelurahan Kedung Halang. Masyarakat Kelurahan Kedung Halang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan peneliti jadikan sebagai informan utama. Sedangkan Lurah Kedung Halang peneliti pilih sebagai informan pendukung

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang di amati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara ini berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian terkait dengan minat dalam keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional.

2. Alat tulis

Alat tulis pada penelitian ini adalah pena dan buku yang digunakan untuk mencatat hasil penelitian.

3. Alat perekam

Alat perekam digunakan untuk merekam hasil wawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan *handphone* untuk merekam hasil wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui untuk melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 5 orang informan.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mempertajam analisis penelitian yang berkaitan dengan minat masyarakat terkait keikutsertaan dalam program jaminan kesehatan nasional.

Validasi Data

Dalam menjaga validasi data serta hasil penelitian ini tetap terjaga kevalidasiannya, peneliti melakukan triangulasi sumber data dan metode. Menurut Sugiyono (2017), triangulasi merupakan suatu pendekatan yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Triangulasi sumber data: menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data untuk menghasilkan bukti. Sedangkan triangulasi metode: melakukan wawancara mendalam, observasi, dan survey untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.

Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan. Data-data yang diperoleh selama penelitian kemudian dikumpulkan, dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk narasi. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah analisa isi (*Content Analysis*) yaitu dengan cara melakukan analisa sesuai dengan masalah penelitian, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Minat Masyarakat Dalam Keikutsertaan Program JKN

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap 5 (lima) orang informan, mereka menyatakan minat yang antusias dan mengatakan bahwa keikutsertaan sebagai peserta BPJS memberikan manfaat dalam biaya pengobatan. Berikut penuturan hasil wawancaranya.

“Kalau untuk minat dari masyarakat itu terlihat antusias, karena memang beberapa program yang sangat membantu dari pemerintah sehingga dari minat masyarakat terlihat antusias. Kalau yang menyebabkan tingginya minat masyarakat itu karena biaya pengobatan di rumah sakit ditanggung sepenuhnya oleh BPJS, jadi seratus persen itu kan ditanggung oleh BPJS. Sedangkan menurunnya itu dikarenakan, ya biasa masyarakat kita biasanya kalau sudah mendapatkan fasilitas itu tidak mau membayar iurannya. Sehingga kan, menurunnya karena tidak mau membayar iurannya. Keluarganya ada yang sakit lagi, baru dibayar.” (IF1)

Hal ini diperkuat oleh pendapat salah satu peserta BPJS Kesehatan yang menyatakan bahwa :*“Saya peserta BPJS Kesehatan. Saya mengetahuinya (BPJS) dari Kelurahan, RT, sama RW. Saya memilih BPJS sebagai asuransi keluarga karena sangat membantu sekali.” (IF4)*

Senada dengan pernyataan di atas, pendapat dari peserta BPJS lain juga mengatakan bahwa :*“Iya, betul. Dari tahun 2015 pakai BPJS. Waktu itu saya kerja jadi didaftarkan BPJS dari perusahaan Alasannya, karena menjamin kesehatan.” (IF3)*

Hal ini diperkuat oleh pendapat Lurah Kedung Halang yang menjelaskan bahwa :*“Minatnya sangat tinggi, ya. Penting ya, buat kesehatan. Di samping kesehatan juga ya, itu kan memang setiap warga masyarakat khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah penting sekali pakai itu (BPJS). Sedangkan BPJS-PBI atau mandiri, kalau PBI ini kan dibayarkan oleh pemerintah, kalau*

mandiri itu kan ada yang dibayarkan oleh perusahaan dan perorangan karena dianggap mampu.” (IF5)

Dari pernyataan beberapa informan di atas diketahui bahwa semua sangat antusias menjadi peserta BPJS, dan berdasarkan data dari kelurahan juga terlihat peningkatan jumlah kepesertaan. Minat masyarakat terhadap pelayanan kesehatan seperti yang dikemukakan Soekidjo Notoatmodjo (2017) dalam pengelompokan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan (*health related behavior*), diantaranya: perilaku sehat, perilaku sakit, dan perilaku peran sakit.

Adapun perilaku sehat (*health behavior*), yakni tindakan atau kegiatan seseorang dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, serta tindakan untuk mencegah penyakit. Sedangkan perilaku sakit (*iliness behaviour*), yakni kemampuan atau pengetahuan individu untuk mengidentifikasi penyakit, penyebab penyakit, serta usaha-usaha mencegah penyakit. Sementara perilaku peran sakit (*the sick role behavior*), yakni segala tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit untuk memperoleh kesembuhan.

Klasifikasi perilaku individu yang berkaitan dengan kesehatan dapat dilihat pada masyarakat Kelurahan Kedung Halang yang menunjukkan peningkatan pendaftaran peserta BPJS karena manfaatnya bagi kesehatan. Selain manfaat bagi individu, masyarakat Kedung Halang menetapkan BPJS Kesehatan sebagai asuransi keluarga karena besarnya iuran yang dibayarkan cukup terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah.

Minat Keikutsertaan Program JKN dan kaitannya dengan Fasilitas Kesehatan

Dari hasil dari wawancara mengenai fasilitas kesehatan dan keuntungan yang didapatkan sebagai peserta BPJS tidak terdapat perbedaan pendapat antara kelima informan tersebut. Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut.

“Kalau untuk fasilitas memang kita akui saat ini perlu ditingkatkan, karena kita juga sering melihat tidak hanya di media elektronik ya, bahkan kadang-kadang dari teman kita sendiri juga mengeluhkan, masuk rumah sakit ditolak karena kamarnya

penuhi. Jadi, memang masih perlu ditingkatkan lagi. Kalau dari segi keuntungan, tentu yang pertama biaya pengobatan rumah sakit jadinya gratis, ya ditanggung oleh BPJS. Terus yang kedua, iuran kalau kita melihat dari segi iuran sebetulnya BPJS ini iurannya paling rendah diantara iuran-iuran untuk asuransi swasta, ya. Jadi untuk iuran kalau asuransi swasta kan mahal ya, kalau asuransi BPJS ini relatif lebih murah.” (IF1)

Mengenai fasilitas dan layanan kesehatan yang didapatkan senada dengan yang dikatakan peserta BPJS pada kutipan wawancara berikut.

“Fasilitasnya sama aja seperti non-BPJS, dapat biaya secara gratis tanpa mengeluarkan uang, berobat gratis. Keuntungannya sih banyak, salah satunya dapat membantu meringankan pembiayaan keluarga.” (IF4)

“Karena ada BPJS ini bisa meringankan untuk pengobatan, yang istilahnya murah. Keuntungannya, ada BPJS ini pengobatan gratis.” (IF2. “Baik, fasilitasnya bagus. Obatnya bagus, layanannya juga baik. Kalau lagi sakit, kalau lagi darurat bisa pakai kartu BPJS.” (IF3)

Hal ini juga ditegaskan oleh Lurah Kedung Halang yang memastikan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan diterima dengan baik oleh masyarakat pengguna BPJS. Hal ini senada dengan pendapat Notoatmodjo (2017) yang mengungkapkan bahwa, fasilitas kesehatan dapat mempengaruhi minat masyarakat secara eksternal (pengaruh dari luar).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Mengenai fasilitas kesehatan yang telah diupayakan pemerintah dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masyarakat menghendaki adanya peningkatan fasilitas dalam hal sarana dan pra-sarana. Kebutuhan akan kesehatan membuat masyarakat Kedung Halang secara rutin memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Sebagai faktor pengaruh dari luar, kelayakan yang ditawarkan fasilitas kesehatan akan menjadi dasar

pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih asuransi kesehatan bagi individu atau keluarga.

Minat Keikutsertaan Program JKN dan kaitannya dengan Persepsi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara mengenai persepsi masyarakat dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa masyarakat sangat senang dan menyadari bahwa keikutsertaan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional memberikan keuntungan yang sangat besar terutama dari segi meringankan beban biaya pelayanan kesehatan. Adapun kutipan wawancaranya yaitu sebagai berikut.

“Kalau persepsi masyarakat tentang JKN atau BPJS ini ya, disambut dengan senang. Karena mengingat ketika orang sakit itu kan perlu biaya yang sangat besar. Jadi dengan adanya program JKN yang berbentuk BPJS ini, ya masyarakat sangat senang.” (IF1)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan lain. *“Pengalaman kami sebelum punya BPJS sangat buruk dan setelah punya BPJS sangat meringankan.” (IF2).* *“Sangat menjamin, kalau yang darurat kita harus pikirin biaya rumah sakit yang mahal. Setelah memiliki BPJS Kesehatan biayanya ringan.” (IF3)*

Peneliti juga mendapatkan respon serupa dari Lurah Kedung Halang mengenai persepsi masyarakat yang mempengaruhi peningkatan pendaftar peserta BPJS Kesehatan, seperti pada kutipan wawancara berikut.

“Antusias banget ya, untuk program seperti ini. Kalau untuk persepsi ya, itu peningkatannya luar biasa banyak yang ikut. Bahkan sampai desa ini pun, BPJS Kesehatan misal mereka kena PHK atau pengurangan karyawan, mereka antusias buru-buru ikut serta BPJS PBI.” (IF5)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Kedung Halang memiliki persepsi yang sama mengenai BPJS Kesehatan. Masyarakat Kedung Halang merasa terbantu di bidang kesehatan karena terdaftar sebagai peserta BPJS. Persepsi masyarakat terhadap keikutsertaan BPJS Kesehatan ditunjukkan dari peningkatan jumlah peserta yang mendaftar.

Soekanto (2012) menyatakan bahwa persepsi merupakan bagian dari proses internal individu dalam menyeleksi dan mengatur stimulus yang berasal dari luar. Stimuli atau rangsangan itu ditangkap oleh indera, dan secara spontan pikiran dan perasaan akan memberi makna atas stimuli tersebut. Makna dari stimuli atau rangsangan diproses di dalam otak kita sebagai informasi yang didapatkan dengan cara mendengar, melihat, meraba, mencium, dan merasa. Persepsi adalah serangkaian proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensori. Informan dalam penelitian ini menyebutkan munculnya persepsi masyarakat Kedung Halang terhadap BPJS Kesehatan berasal dari bentuk komunikasi secara verbal melalui sosialisasi. Hasil dari komunikasi tersebut yang dapat membentuk persepsi masyarakat sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk ikutserta pada program JKN.

Minat Keikutsertaan Program JKN dan kaitannya dengan Pengetahuan

Hasil dari wawancara kepada lima orang informan mengenai pengetahuan masyarakat Kedung Halang dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang mengerucut pada pentingnya diadakan sosialisasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu sebagai berikut.

“Kalau sosialisasi ini sebenarnya perlu, ya. Penting juga sosialisasi tentang BPJS, tentang JKN ini apa manfaat dan apa kekurangannya. Ini masih perlu. Bentuknya bisa melakukan iklan dengan media elektronik dan media cetak. Kemudian iklan di internet tentang keunggulan, kelebihan dari mengikuti atau keikutsertaan BPJS Kesehatan. Kalau di kelurahan Kedung Halang sendiri belum, belum ada. Baik dari (mohon maaf) karena saya baru menjabat 2 tahun yang saya alami sampai saat ini belum pernah. Kalau sebelumnya mungkin pernah tapi saya tidak tahu, kalau yang selama 2 tahun ini belum.” (IF1)

Informan lain mengatakan pernah mendapatkan sosialisasi tentang BPJS Kesehatan dari Kelurahan Kedung Halang. Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut.

“Ya, saya tahu BPJS. Kalau gak salah, BPJS itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pelayanan setelah menjadi anggota BPJS, operasi pun Ibu pakai BPJS. Saya tahu BPJS dari sosialisasi yang diadakan kelurahan setempat. Sosialisasinya bertemu warga bersama RT ke kelurahan untuk mendaftar BPJS.”

(IF2)

“Ya, saya mengetahuinya. Kepanjangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pelayanannya serba gratis. Saya tahu BPJS dari sosialisasi. Pernah lurah setempat mengadakan sosialisasi terkait BPJS ini. Ada undangan dari pihak RT untuk datang ke Kelurahan tentang sosialisasi BPJS.” **(IF4)**

Mengenai sosialisasi BPJS Kesehatan di tingkat kelurahan, Lurah Kedung Halang menegaskan bahwa *“Sebetulnya perlu ya, dianggap kebutuhan sehari-hari. Sebetulnya memang harus ada sosialisasi. Bentuk sosialisasi kan bisa lewat RT/RW, bisa lewat wadah kumpulan, karena penting banget BPJS Kesehatan ini untuk disosialisasikan ke keluarga atau masyarakat. Di kelurahan Kedung Halang sudah pernah diadakan melalui kader PKK, Posyandu, RT/RW. Sering sekali sosialisasi.”* **(IF5)**

Informan dalam penelitian ini memiliki pengetahuan mengenai BPJS Kesehatan sebagai program pelayanan kesehatan yang diinisiasi oleh pemerintah guna meringankan pembiayaan di fasilitas kesehatan. Informasi yang didapatkan masyarakat melalui sosialisasi dapat disebut sebagai pengetahuan, sehingga hal itu dapat menjadi stimulus bagi masyarakat Kedung Halang untuk mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan. Akan tetapi, terdapat keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait seluk-beluk BPJS Kesehatan, sehingga hal ini menimbulkan beberapa persoalan administrasi yang dialami oleh masyarakat itu sendiri.

Kendala yang umum terjadi karena ketidaktahuan masyarakat, misalnya pihak rumah sakit hanya mengklaim sebagian dari biaya perawatan atau pengobatan. Masyarakat yang beranggapan bahwa semua biaya pengobatan akan ditanggung oleh BPJS sepenuhnya merasa kecewa karena rumah sakit hanya menyetujui klaim pembiayaan setengah dari total biaya. Dalam hal ini, sosialisasi bukan hanya bertujuan memperkenalkan BPJS pada masyarakat, tetapi juga menjelaskan teknis terkait administrasi yang harus dipahami oleh peserta.

Minat Keikutsertaan Program JKN dan kaitannya dengan Motivasi

Motivasi masyarakat Kedung Halang dalam keikutsertaan BPJS Kesehatan tidak lepas dari keinginan untuk mendapatkan pelayanan pengobatan yang gratis dan murah, seperti penuturan informan berikut ini. *“Motivasinya ya, mendapatkan layanan pengobatan yang gratis dan murah. Itu motivasinya, sehingga mengikuti program BPJS atau JKN dari pemerintah ini.” (IF1).*

Hal senada juga disampaikan oleh informan yang merupakan peserta BPJS Kesehatan. *“Motivasi Ibu karena BPJS ini sangat butuh buat Ibu. Oh gak ada pertimbangan, Ibu langsung menerima.” (IF2).* *“Supaya kita kalau berobat lebih dimudahkan dan diringankan. Enggak ada pertimbangan, langsung menerima.” (IF3).* *“Bisa meminimalisir pembiayaan keluarga. Tidak ada pertimbangan sih karena sangat membantu.” (IF4)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Kedung Halang termotivasi untuk mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan karena membutuhkan asuransi tersebut, di samping biaya iuran yang terjangkau. Masyarakat juga langsung menerima Program JKN dan tanpa pertimbangan memutuskan untuk ikutserta karena kemudahan dan keuntungan yang diberikan sebagai peserta BPJS.

Motivasi berasal dari bahasa latin *motive* atau *moreve* yang berarti dorongan dari dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku. Motivasi merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi minat seseorang yang ditunjukkan dari tindakannya. Motivasi berkaitan dengan kebutuhan (*needs*) yang melihat adanya potensi pada suatu fenomena sehingga mendorong individu untuk menanggapi atau merespon hal tersebut. Tanggapan terhadap kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan dengan harapan dari tindakan tersebut seseorang dapat merasakan kepuasan. Apabila suatu kebutuhan belum direspon maka hal itu akan berpotensi untuk muncul kembali sampai dengan terpenuhinya kebutuhan yang dimaksud (Notoatmodjo, 2017).

Kebutuhan individu dalam bidang kesehatan, memberikan stimulus berupa motivasi masyarakat Kedung Halang untuk mengikuti kepesertaan BPJS

Kesehatan. Hal ini didorong oleh pengetahuan masyarakat terhadap besaran biaya asuransi yang terjangkau. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan, masyarakat Kedung Halang memutuskan untuk menerima Program JKN dan ikutserta sebagai peserta BPJS karena kemudahan dan keuntungan yang diberikan dalam bidang kesehatan.

Minat Keikutsertaan Program JKN dan kaitannya dengan Sikap

Dari hasil wawancara diperoleh hasil bahwa sikap masyarakat menerima program jaminan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah. Namun beberapa informan mengatakan bahwa walaupun Program JKN ini sangat membantu masyarakat dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan, mereka mengatakan butuh kesabaran yang tinggi ketika menggunakan layanannya, dikarenakan harus antri yang lama mulai dari pendaftaran dan pelayanan diperoleh. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara berikut ini. *“Sikapnya, tentunya dengan program JKN ini senang dan antusias. Selama ini sih, saya melihat tidak ada sikap penolakan dari masyarakat, semua menerima, karena memang banyak membantu”.* (IF1) *“Ya, saya menerima BPJS ini. Kendalanya memang BPJS ini harus antri, harus sabar. Yang pertama kita harus buru-buru daftar dulu jadi kita harus antri, sayang kan punya BPJS gak dipake. Menyikapinya gimana ya, karena udah kewajiban Ibu pake ini, ya Ibu harus sabar, harus nunggu.”* (IF2) *“Iya menerima. Tidak ada kendala, paling harus antri. Menyikapinya dengan cara menunggu aja, sabar.”* (IF3)

Masyarakat Kelurahan Kedung Halang memiliki sikap masing-masing dalam mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal ini disebabkan dari pengalaman menggunakan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Secara umum, masyarakat Kedung Halang tidak ada yang menolak BPJS Kesehatan, hanya saja di lapangan pernah terjadi kendala sehingga mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap BPJS Kesehatan.

Sikap merupakan evaluasi terhadap berbagai aspek dalam merespon berbagai fenomena sosial. Menurut Elisa (2017), sikap dapat mempengaruhi banyak hal tentang perilaku seseorang sehingga sikap dapat menentukan berbagai hal yang penting dalam interaksi sosial. Sikap yang ditunjukkan masyarakat dalam

mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam hal ini dapat berupa pengalaman menggunakan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk.

Secara umum, masyarakat Kedung Halang menunjukkan sikap penerimaan terhadap BPJS Kesehatan, hanya saja pernah terjadi beberapa kendala di lapangan sehingga mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap BPJS Kesehatan. Sikap masyarakat juga dapat dilihat dari reaksi yang dihadirkan ketika masyarakat dalam kondisi sehat atau kondisi sakit.

Sikap masyarakat yang positif akan mendaftarkan kepesertaan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk meringankan beban biaya jika suatu saat memerlukan pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan. Sedangkan sikap masyarakat yang negatif adalah sikap acuh tak acuh yang menyepelekan kepemilikan asuransi kesehatan, seperti tidak membayar iuran bulanan sehingga menunggak. Hal ini akan mempersulit proses administrasi dan menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit.

PENUTUP

Hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa bahwa minat masyarakat dalam keikutsertaan Program JKN melalui badan penyelenggaranya yaitu BPJS Kesehatan, menunjukkan antusiasme yang tinggi. Antusiasme masyarakat dapat dilihat dari peningkatan jumlah pendaftar peserta BPJS Kesehatan di tingkat Kelurahan. Tingginya minat masyarakat ini juga dikarenakan besaran iuran yang cukup murah dan kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan. Dan yang lebih penting bahwa masyarakat menyadari bahwa dengan menjadi peserta BPJS akan sangat bermanfaat untuk mengurangi biaya pengobatan dan perawatan di fasilitas kesehatan jika terjadi keadaan sakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, C. *Psikologi Sosial untuk Perawat*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC; 2009.
- Adnani, H. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Nuha Medika; 2011.
- Ahmadi, R. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media; 2016.
- Amelia L, Purbolaksono A, Nur A. *Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin Kota: Dari Implementasi hingga Harapan Pembangunan Kesejahteraan Paska Pilpres 2014 (Studi Kasus DKI Jakarta)*. Jakarta: The Indonesian Institute; 2014.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta; 2010.
- Azwar, S. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2015.
- Berutu, S. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keikutsertaan Masyarakat sebagai Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Desa Kaban Tengah Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Barat Tahun 2019 (Disertasi)*. Institut Kesehatan Helvetia; 2019.
- Devi, AP. *Faktor Predisposisi yang Berhubungan Terhadap Minat Masyarakat untuk Mengikuti JKN-KIS pada Pasien Umum Rawat Jalan di Poliklinik Dalam RSUD Kota Madiun (Disertasi)*. STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun; 2019.
- Herana, A. *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul [Internet]. 4–11; 2018.
- Hunaepi, A., Dirlanudin, G. Ismanto. *Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak (Disertasi)*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 2015.
- Hapsari, W., Kiki, N. Wahyu, R. *Analisis Minat Masyarakat dalam Keikutsertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan*. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu. Volume 1 Nomor 2; 2019. <https://doi.org/10.35720/tscners.v4i2>.
- Notoatmodjo, S. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta; 2003.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Priyoto. *Teori Sikap dan Perilaku Dalam Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika; 2018.

Puspitasari, Y. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Pekerja Bukan Penerima Upah di Desa Kasiyan Timur Wilayah Kerja Puskesmas Kasiyan Kabupaten Jember Tahun 2016. Universitas Jember; 2017.

Santoso B, Hendartini Y, Rianto B, Trisnantoro L. *Information System for Prevention of National Healthcare Insurance Fraud Among Inpatients of Advanced Referral Health Services*. *Public Health of Indonesia*; 2018. <https://www.journal.ugm.ac.id/ahj/article/view/33624>

Siswoyo B, Prabandari YS, Hendartini Y. Kesadaran Pekerja Sektor Informal terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*; 2019 Oct 29; 04: 118–25.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta; 2017.

Sunardi S, Ruhyannuddin F. *The JKN Participants' Experience on the BPJS Service in Malang Indonesia*. *Jurnal Keperawatan*. 2018 Jul 27;9(2):134.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).